

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA
EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

Kota : Palopo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Urusan Yang Dilaksanakan : Urusan Perhubungan

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) adalah : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Anggaran : Rp. 379.875.000 • Realisasi : Rp. 379.549.891 2. Program Rehabilitasi prasarana perhubungan • Anggaran : Rp. 37.135.000 • Realisasi : Rp. 37.134.900 3. Program peningkatan pelayanan angkutan • Anggaran : Rp. 1.463.972.000 • Realisasi : Rp. 1.463.657.500 4. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas • Anggaran : Rp. 49.999.000 • Realisasi : Rp. 49.992.000	4 Program	Lihat di APBD Lampiran 0.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	1. SOP tentang pengujian Kendaraan Bermotor 2. SOP tentang penggunaan peralatan pengujian	Jumlah 2 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. UU No. 22 Thn 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. 2. Perda No. 1 Thn 2017 tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan 3. Perda No. 2 Thn 2012 tentang retribusi jasa umum. 4. Perda No. 3 Thn 2012 tentang retribusi jasa usaha	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio jabatan struktur dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (Yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 17 Jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18 Jabatan	94,44 %	Sumber data BKD /DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah		Tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2019
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kompetensi SDM yang menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kota	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap total PNS Kota	PNS Perangkat daerah, sebanyak 73 personel - Total PNS Kota sebanyak 4.503. personel	1, 62 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diomodifikasi dalam DPA dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diomodifikasi dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2018.	
				Jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.			
6	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 8.053.723.000 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 1.008.057.603.046	0,80 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.7893830,679 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.956.778.838.394,93	0,83 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019	
			15	Total Belanja dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.2.636.600.000 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah Sebesar Rp. 8.053.723.000	32,74 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.	
			16	Total Belanja Tidak langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.5.417.123.000 - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.8.053.723.000	67,26 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Laporan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	1. Neraca 2. Calk 3. LRA 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 jenis Laporan	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, Calk)
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	1. KIB A 2. KIB B 3. KIB C	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumentasinya (inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat- Daerah x 100 %	Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp.29.704.344 Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp.15.147.919.280	0,20 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas prasarana partisipasi	1. Papan Jurusan 2. Mobil Patroli 3. Kotak Saran	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)

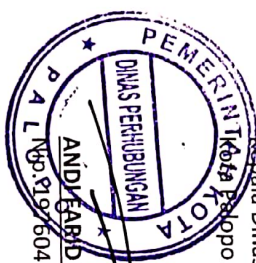
NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey/Keputusan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Keputusan Masyarakat terhadap Pelayanan publik		tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/Perangkat Daerah.

Palopo, 24 Februari 2020

Mengetahui

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Palopo



ANDI FARID BASO RACHIM, A.P
No. 819/60419 199412 1 001

KOTA : PALOPO
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : II.3 LAMPIRAN IKK UNTUK KOTA

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
15	Perhubungan	102	Rasio konektivitas Kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ - IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kabupaten tersebut - IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kabupaten tsb x bobot lintas dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kabupaten tersebut) Keterangan: - IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP = 4 Trayek - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu = 7 - Trayek - IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil = 0 (Tidak Ada Penyebrangan Sungai) - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)	57,14	

			Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 IK1 = $\frac{Jumlah\ Trayek\ x\ Bobot\ Trayek}{Kebutuhan\ Trayek} \times Bobot\ Angkutan\ Jalan$ IK1 = $\frac{4 \times 1}{7} \times 100 = 57.14$	
	Kinerja lalu lintas Kota	V/C Ratio di Jalan Kota V/C = Volume : Kapasitas Jalan Jalan. Andi Tenri Ajeng Volume : 854 SMP/jam Kapasitas : 1996 SMP/jam V/c = $\frac{854}{1996} = 0,43$ KET: SMP : Satuan Mobil Penumpang	0,43	

Mengetahui

